

# OPTIMALISASI BELANJA MODAL UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI KABUPATEN BLORA PROVINSI JAWA TENGAH

Oktavia Hardian Sari

NPP 31.0472

Asdaf Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Keuangan Publik

Email: oktaviahs10@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Eljawati, S.Sos.,MM

## ABSTRACT

**Problem Statement/Background (GAP):** *The community's need for infrastructure in Blora Regency, especially road infrastructure, is very high because many roads are still damaged and need to be repaired. This is influenced by capital expenditure that finances infrastructure development that is not yet optimal. Purpose:* This study aims to analyze and optimize capital expenditure to improve infrastructure development in Blora Regency, Central Java Province. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method. The data collection techniques were observation, interviews (6 informants) and documentation. The data collected was analyzed using optimization theory according to Siringoringo (2005). **Result:** The findings obtained by the author in this study are that capital expenditure is still not optimal so that it affects infrastructure development that is not good and adequate. This is seen from 3 dimensions which include objectives, alternative decisions and limiting resources. The things that hinder the optimization of capital expenditure are financial capability, limited human resources and expansive land conditions. **Conclusion:** Capital expenditure to improve infrastructure development in Blora Regency, Central Java Province is still not optimal, because it has not fulfilled the dimensions and indicators to be considered optimal. In order to improve the optimization of capital expenditure to improve infrastructure development, it is recommended that the central or regional government make submissions and make regional loans, recruitment of employees and recommendations for building construction.

**Keywords:** *capital expenditure, infrastructure, optimization*

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur di Kabupaten Blora terutama infrastruktur jalan sangat tinggi karena masih banyak yang rusak dan perlu diperbaiki. Hal ini dipengaruhi belanja modal yang membiayai pembangunan infrastruktur belum optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara (6 informan) dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teori optimalisasi menurut Siringoringo (2005). **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu belanja modal masih belum optimal sehingga berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur yang belum baik dan memadai. Hal ini dilihat dari 3 dimensi yang meliputi tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang membatasi. Adapun hal yang

menghambat dari optimalisasi belanja modal adalah kemampuan keuangan, sumber manusia yang terbatas dan kondisi tanah yang ekspansif. **Kesimpulan:** Belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal, dikarenakan belum memenuhi dimensi dan indikator untuk dikatakan optimal. Guna meningkatkan optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, disarankan agar melakukan pengajuan kepada pemerintah pusat atau daerah dan melakukan pinjaman daerah, perekrutan pegawai serta rekomendasi konstruksi bangunan.

**Kata kunci:** belanja modal, infrastruktur, optimalisasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur masih menjadi permasalahan utama bagi setiap daerah di seluruh Indonesia. Infrastruktur mengacu pada fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial yang menyediakan air, transportasi, bangunan, dan sistem fisik lain (Kuncoro, 2010). Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Blora banyak mengalami kerusakan, pada tahun 2022 kondisi jalan yang baik sepanjang 481,35 kilometer sedangkan untuk jalan yang rusak sepanjang 398,98 kilometer (Dinas PUPR, 2022). Kebutuhan masyarakat terhadap infrastruktur yang sangat tinggi membuat pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan pembangunan. Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pembangunan infrastruktur salah satunya yaitu anggaran yang terbatas. Pemerintah perlu meningkatkan anggaran belanja modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur sehingga dapat berjalan dengan optimal dan merata.

Belanja modal merupakan pengalokasian anggaran dana dari pemerintah daerah dalam APBD untuk menambah aset tetap pemerintah (Adisasmita, 2011). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa belanja modal adalah belanja yang diperuntukkan guna pembiayaan pengadaan atau pembangunan aset tetap yang berwujud dengan nilai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Belanja modal adalah pembiayaan bagi pengadaan aset tetap (Siregar, 2015). Belanja modal terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya. Belanja modal bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH).

Kabupaten Blora merupakan salah satu kabupaten administratif di Provinsi Jawa Tengah yang setiap tahunnya menganggarkan belanja modal yang akan digunakan pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang APBD yang berlaku dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) menjelaskan terkait batas minimal belanja infrastruktur yang harus dialokasikan yaitu sebesar 40% dari APBD. Total belanja daerah Kabupaten Blora tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.567.920.444.798, anggaran belanja modal hanya Rp 543.008.938.252 atau 21,41%, seharusnya belanja modal sebesar 40% dari total APBD. Alokasi APBD Kabupaten Blora paling banyak untuk belanja operasional yaitu sebesar Rp 2.007.196.388.087 atau 78,16 % dari APBD.

Kondisi jalan di Kabupaten Blora banyak yang dinilai strategis namun kurang layak untuk dilalui kendaraan sehingga perlu untuk segera diperbaiki. Tujuan utama pembangunan jalan yaitu untuk membuka akses transportasi darat agar lebih mudah dilalui sehingga mampu mendorong perekonomian masyarakat Kabupaten Blora dan berbagai sektor lainnya dapat berkembang sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Pembangunan jalan terus dilakukan setiap tahunnya dengan anggaran belanja modal yang ada, akan tetapi masih belum mampu memberikan



perubahan yang signifikan. Berikut rincian perkembangan infrastruktur jalan di Kabupaten Blora tahun 2019-2022.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Blora 2019-2022**

| Kondisi Jalan | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bagus         | 582,68 km | 269,93 km | 488,65 km | 481,35 km |
| Sedang        | 147,09 km | 501,46 km | 289,99 km | 330,51 km |
| Rusak         | 285,56 km | 412,45 km | 107,71 km | 63,96 km  |
| Rusak Berat   | 195,51 km | 27,00 km  | 324,49 km | 335,02 km |

*Sumber : Binamarga/Dinas PUPR Kabupaten Blora*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa setiap tahunnya dari 2019-2022 kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Blora mengalami perubahan dari kondisi jalan yang bagus, sedang, rusak, hingga rusak berat. Pada tahun 2019 perbandingan kondisi jalan yang bagus dengan yang rusak hingga rusak berat yaitu 582,68 kilometer : 481,07 kilometer. Tahun 2020 yaitu 269,93 kilometer : 439,45 kilometer, tahun 2021 yaitu 488,65 kilometer : 432,2 kilometer dan tahun 2022 yaitu 481,35 kilometer : 398,98 kilometer.

Pemerintah Kabupaten Blora harus meningkatkan realisasi belanja daerah yang berorientasi pada pembangunan daerah terutama infrastruktur yaitu belanja modal. Pengelolaan belanja modal yang optimal yaitu efektif dan efisien dapat berdampak pada peningkatan pembangunan infrastruktur jalan. Meskipun suatu daerah tidak memiliki banyak sumber pendapatan, namun jika mampu mengelola belanja modal dengan baik maka dapat mendorong pembangunan infrastruktur di daerah. Jika Pemerintah daerah terus berupaya melakukan pembangunan dengan optimal maka akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan diatas, bisa dilihat bahwa belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora masih belum optimal. Maka penulis akan melakukan penelitian tentang masalah tersebut untuk meningkatkan optimalisasi belanja modal sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat berjalan dengan baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan penggunaan optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Blora yaitu pertama, kondisi jalan di Kabupaten Blora banyak mengalami kerusakan pada tahun 2022 kondisi jalan yang baik sepanjang 481,35 kilometer sedangkan untuk jalan yang rusak sepanjang 398,98 kilometer. Kedua, realisasi belanja modal belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah (HKPD) menjelaskan terkait batas minimal belanja infrastruktur yang harus dialokasikan yaitu sebesar 40% dari APBD. Total belanja daerah Kabupaten Blora tahun 2022 adalah sebesar Rp 2.567.920.444.798, anggaran belanja modal hanya Rp 543.008.938.252 atau 21,41%, seharusnya belanja modal sebesar

40% dari total APBD. Alokasi APBD Kabupaten Blora paling banyak untuk belanja operasional yaitu sebesar Rp 2.007.196.388.087 atau 78,16 % dari APBD.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks belanja modal maupun konteks pembangunan infrastruktur. Penelitian Rambe dan Iskandar berjudul Peran Belanja Modal Pada Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sleman, menemukan bahwa Pemanfaatan belanja modal untuk infrastruktur jalan mampu memberikan manfaat tapi belum berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman (Rambe and Iskandar 2021). Penelitian Perdana, Aru, and Eka yang berjudul Studi Pendekatan 7S Mckinsey Dalam Peningkatan Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Semarang menemukan bahwa Dari analisis 7S McKinsey yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa secara umum pemanfaatan belanja modal di Kabupaten Semarang sudah cukup efektif (Perdana, Aru, and Eka 2023). Penelitian oleh Magfiroh dengan judul Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Lamongan menemukan bahwa Sumber PAD belum optimal dalam membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Hanya 10-15% PAD yang digunakan untuk belanja pembangunan dan pembangunan infrastruktur lebih banyak menggunakan dana perimbangan (Magfiroh 2019). Penelitian dengan judul Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan: Tinjauan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara oleh Savitri dan Sari menemukan bahwa PAD dan DAU berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal. DAU dan DBH tidak berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Utara. PAD perlu ditingkatkan agar dapat membiayai belanja daerah sehingga mengurangi transfer dana perimbangan (Savitri and Sari 2022). Berdasarkan hasil penelitian Finuliyah dan Moh. Khusaini yang berjudul Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Wilayah menunjukkan bahwa retribusi daerah, belanja infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh positif signifikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dibuktikan dengan retribusi yang mempengaruhi belanja infrastruktur secara positif signifikan untuk kemudian mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan jika pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada kinerja ekonomi berdasarkan kualitas belanja yang dilakukan. Besaran retribusi dari masyarakat yang semakin tinggi kepada pemerintah daerah akan dapat berdampak pada belanja infrastruktur yang dilakukan untuk melakukan pembangunan (Finuliyah & Khusaini, 2022).

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yaitu optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur. Lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah berbeda dengan penelitian terdahulu. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif berbeda dengan penelitian Rambe, Perdana, Magfiroh, Savitri, maupun Firdaus dkk. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu menggunakan pendapat dari Hotniar Siringoringo (Siringoringo, 2005) yang menyatakan bahwa optimalisasi ditentukan melalui tiga dimensi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumber daya yang membatasi.



### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan yaitu pertama, untuk mengetahui dan menganalisis optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah. Ketiga yaitu upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisis data menggunakan pendekatan induktif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian induktif. Menurut (Simangunsong, 2017) penelitian kualitatif fokus pada pencarian makna yang dibangun dari perumusan masalah yang disusun dalam tema-tema penelitian dan sifatnya subjektif. Creswell mengatakan bahwa Penelitian kualitatif sangat tepat digunakan untuk mengeksplor permasalahan lebih dalam dan menjawab isu yang tidak dapat diketahui variabel-variabelnya dalam penelitian (Cresswell, 2015). Penelitian dengan metode deskriptif yakni membuat pemerian (penyanderaan) secara faktual, sistematis, dan akurat tentang fakta dan sifat objek yang diteliti (Usman & Akbar, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan induktif karena peneliti menganalisis permasalahan yang sedang terjadi sesuai dengan keadaan seharusnya secara sistematis. Pemanfaatan penalaran induktif berawal dari argumen yang menyempit menuju argument yang meluas (Kadji, 2016). Penulis berfokus pada masalah atau fokus yang akan diteliti. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui Reduksi Data, Penyajian Data, dan Kesimpulan (Nurdin, 2018).. Dalam teknik penentuan informan peneliti menggunakan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2012) dimana penulis memilih informan yang memiliki jabatan atau yang dianggap paling tahu terkait permasalahan yang ada. Penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala BPPKAD Kabupaten Blora, sekretaris, Kepala Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Belanja, Kepala Bidang Aset Daerah, Kepala Bidang Anggaran dan staff. Adapun analisisnya menggunakan teori optimalisasi yang digagas oleh Hotniar Siringoringo (Siringoringo, 2005) yang menyatakan bahwa optimalisasi ditentukan melalui tiga dimensi yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah**

Penulis menganalisis optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah menggunakan pendapat dari Siringoringo yang menyatakan bahwa optimalisasi ditentukan melalui tiga dimensi yaitu tujuan, alternatif keputusan, dan sumber daya yang membatasi. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut :

#### **3.1.1 Tujuan**

Tujuan dari optimalisasi belanja modal yaitu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan yang selama ini banyak yang bermasalah atau rusak. Jika belanja modal optimal maka pembangunan berjalan dengan baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena perekonomiannya meningkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya harus memenuhi beberapa indikator yang telah dirumuskan yaitu sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan Pendapatan Daerah  
untuk memaksimalkan pendapatan dapat dilakukan dengan adanya terobosan dan insiatif dari pemerintah daerah, yaitu meningkatkan pendapatan daerah yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lainnya. Dana transfer meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus serta Pendapatan daerah lain yang sah. Kemudian berupaya untuk menggali sumber-sumber lain yang masih berpotensi untuk ditingkatkan. Apabila pendapatan daerah dapat dimaksimalkan dan melebihi target maka anggaran besar sehingga alokasi belanja modal juga besar.
- b. Meminimalkan Pengeluaran Daerah  
untuk meminimalkan anggaran dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu, memproyeksikan keuangan dalam satu periode anggaran, penghematan biaya untuk hal mendesak dan darurat, serta menghindari pemborosan dalam pembelian aset.
- c. Ketersediaan Infrastruktur yang Baik dan Memadai  
Pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Blora dalam fasilitas publik cukup baik, hanya saja kurang baik pada sektor perhubungan khususnya jalan Kabupaten Blora masih terdapat banyak sekali kekurangan yang perlu dibenahi dan diperbaiki kedepannya.

### 3.1.2 Alternatif Keputusan

Keputusan diambil dengan memilih yang terbaik dan resiko paling kecil berdasarkan alternatif-alternatif keputusan yang ada. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai keputusan yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan beberapa indikator yang telah dirumuskan yaitu sebagai berikut:

- a. Perubahan Proporsi Belanja  
Belanja modal atau belanja infrastruktur masih belum sesuai dengan batas minimal belanja infrastruktur yaitu sebesar 40% dari total APBD. Perlu adanya penambahan proporsi belanja modal, akan tetapi sulit untuk mengurangi proporsi belanja lain karena sama-sama penting.
- b. Prioritas Kebijakan Pembangunan Infrastruktur  
Pembangunan sudah disesuaikan dengan visi misi RPJMD yaitu dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Jalan adalah komponen utama penggerak perekonomian sebagai aksesibilitas dan konektivitas maka, prioritas pembangunan infrastruktur daerah di Kabupaten Blora adalah pembangunan infrastruktur jalan.

### 3.1.3 Sumber Daya yang Membatasi

Sumber daya merupakan salah satu faktor terpenting untuk melangsungkan penyelenggaraan pemerintahan, akan tetapi karena beberapa faktor sumber daya menjadi terbatas. Untuk melihat sejauh mana sejauh mana sumber daya yang membatasi diperlukan beberapa indikator yang telah dirumuskan sebagai berikut:

- a. Kemampuan Keuangan  
Kabupaten Blora memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan keuangan yang berdampak terhadap kurang berhasilnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur yang ada di daerah termasuk infrastruktur jalan yang masih belum optimal pembangunannya karena anggaran sumber belanja modal yaitu pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terbatas.
- b. Kondisi Alam yang Tidak Mendukung  
Kabupaten Blora berada diatas tanah yang ekspansif. Tanah ekspansif adalah tanah yang lapisan di dalamnya mudah terjadi perubahan yaitu mengembang dan menyusut karena pengaruh dari



kadar air yang masuk sangat mempengaruhinya. Hal ini mengakibatkan kualitas infrastruktur jalan dengan konstruksi yang tidak pas dapat cepat mengalami kerusakan.

### **3.2. Faktor Penghambat Optimalisasi Belanja Modal untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah**

#### **a. Kemampuan Keuangan**

Kemampuan keuangan menjadi hal yang sangat penting dan mendasar bagi setiap pemerintah daerah. Berbagai permasalahan yang terjadi di daerah tidak bisa teratasi dengan cepat dikarenakan kemampuan keuangan yang dimiliki daerah tersebut, keterbatasan anggaran yang menjadi salah satu faktor menghambat pembangunan daerah. Kabupaten Blora mempunyai kendala dalam hal kemampuan keuangan, hal ini tentunya berdampak pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah dan proses penyelenggaraan pemerintahan.

#### **b. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia atau pegawai merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu penting untuk memiliki sumber daya manusia yang berkompeten. Kabupaten Blora mengalami kekurangan sumber daya manusia khususnya secara kuantitatif, jumlah pegawai masih kurang sehingga banyak pegawai yang merangkap jabatan yang menyebabkan kurang maksimalnya hasil kerja yang dilakukan.

#### **c. Kondisi Tanah Ekspansif**

Kondisi tanah yang ekspansif merupakan kondisi tanah yang mudah mengalami perubahan volume akibat perubahan kadar air dalam lapisan tanah, hal ini mengakibatkan konstruksi bangunan yang ada di atasnya tidak bertahan lama. Kabupaten Blora memang berada dan terletak di daerah tanah yang ekspansif, tanah menjadi labil seiring dengan musim yang terjadi yang berakibat pada perubahan kadar air dalam tanah. Pergerakan tanah berdampak buruk pada konstruksi pembangunan, bangunan akan cepat rusak, dan dituntut untuk membangun ulang. Sehingga muara akhir dari kondisi tanah yang ekspansif ini adalah penyediaan anggaran untuk mengatasi konstruksi pembangunan juga besar.

### **3.3. Upaya yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora dalam Optimalisasi Belanja Modal Untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah**

#### **a. Pengajuan Kepada Pemerintah Pusat atau Daerah dan Pinjaman Daerah**

Pemerintah daerah dapat melakukan pengajuan berupa permohonan ke pemerintah provinsi atau pemerintah pusat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah merupakan usaha untuk mendapatkan perhatian dalam hal ini permasalahan anggaran untuk pembangunan. Pengajuan ini harus disertai dengan pemenuhan persyaratan dan data terkait yang konkrit, sehingga peluang untuk mendapatkan dana tersebut juga besar. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah guna untuk mendapatkan anggaran dana tambahan adalah melalui pinjaman daerah. Pinjaman daerah merupakan suatu usaha alternatif pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Pinjaman kepada pihak lain atau pihak ketiga ini mengakibatkan pemerintah daerah dibebani kewajiban untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman daerah bukan merupakan suatu hal yang dilarang atau melanggar hukum. Tapi yang harus diingat adalah pemerintah daerah menjadi dibebani dengan yang namanya kewajiban daerah yang harus dipenuhi pembayarannya dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

#### **b. Perekrutan Pegawai**

Sumber daya manusia yang terbatas jumlahnya dapat mengakibatkan pegawai merangkap jabatan yang berdampak pada kurang maksimalnya pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang dikerjakan. Selain itu, pegawai yang berkompeten juga diperlukan untuk menyelenggarakan

pemerintahan terutama pengelolaan keuangan. perekrutan pegawai dilakukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan tanggungjawab. Kualifikasi sudah ditentukan dan sebelum bekerja pegawai melakukan diklat atau pelatihan terlebih dahulu agar memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas di BPPKAD Kabupaten Blora.

c. **Rekomendasi Konstruksi Bangunan**

Bangunan yang dibangun harus memiliki konstruksi yang kuat dan tepat, hal ini bertujuan agar bangunan dapat bertahan lama tentunya dengan kualitas yang bagus. Konstruksi bangunan juga harus disesuaikan dengan medan atau daerah tersebut berada, karena setiap daerah memiliki daya tahannya masing-masing karena berdasarkan kondisi demografi yang dimilikinya. Konstruksi yang tepat akan menentukan kualitas dari suatu bangunan, maka diperlukan pengkajian dari segi demografi wilayah. Kabupaten Blora memiliki jenis tanah yang ekspansif, yaitu mudah mengalami perubahan volume akibat perubahan kadar air dalam lapisan tanah, yang nantinya berakibat pada pergerakan tanah tersebut. Maka dari itu diperlukan konstruksi yang tepat untuk membangun suatu konstruksi bangunan di Kabupaten Blora.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah masih belum optimal ditandai dengan masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak dan perlu diperbaiki meskipun sudah ada perubahan akan tetapi belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sama halnya dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Rambe dan Iskandar bahwa pemanfaatan belanja modal untuk infrastruktur jalan mampu memberikan manfaat tapi belum berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Rambe and Iskandar 2021). Berbeda dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Perdana, Aru bahwa secara umum pemanfaatan belanja modal di Kabupaten Semarang sudah cukup efektif (Perdana, Aru, and Eka 2023).

Temuan ini memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Magfiroh karena sumber belanja modal belum optimal yang salah satunya yaitu pendapatan asli daerah (PAD) pada penelitian yang dilakukan Magfiroh ditemukan bahwa sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang belum optimal dalam membantu pelaksanaan pembangunan infrastruktur, hanya 10-15% PAD yang digunakan untuk belanja pembangunan dan pembangunan infrastruktur (Magfiroh 2019). Temuan ini juga memperkuat temuan sebelumnya yang dilakukan oleh Finuliyah dan Moh. Khusaini bahwa besaran retribusi dari masyarakat yang semakin tinggi kepada pemerintah daerah akan dapat berdampak pada belanja infrastruktur yang dilakukan untuk melakukan pembangunan (Finuliyah & Khusaini, 2022), hal tersebut dikuatkan pada temuan penelitian ini dikarenakan sumber belanja modal yang salah satunya yaitu PAD yang bersumber dari retribusi belum optimal yang berdampak terhadap belanja modal yang belum optimal juga.

Temuan ini menolak penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Savitri dan Sari karena perbedaan sumber belanja modal. Pada temuan ini sumber belanja modal yaitu PAD, DAU, DBH memberikan pengaruh terhadap anggaran belanja modal, sedangkan pada penelitian Savitri dan Sari hanya PAD dan DAU yang berpengaruh, untuk DBH tidak berpengaruh terhadap anggaran belanja modal (Savitri and Sari 2022).

### **3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan faktor penghambat yang jarang diketahui oleh masyarakat yaitu kemampuan keuangan masih kurang, sumber daya manusia yang terbatas yaitu kurangnya jumlah dan kemampuan pegawai serta kondisi tanah yang ekspansif.



#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa belanja modal belum optimal dikarenakan masih belum memenuhi dimensi dan indikator untuk dapat dikatakan optimal menurut Teori Siringoringo (2005). Faktor penghambat antara lain kemampuan keuangan, sumber daya manusia yang terbatas dan kondisi tanah yang ekspansif. Upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengajuan kepada pemerintah pusat atau daerah, melakukan pinjaman daerah, perekrutan pegawai dan rekomendasi konstruksi bangunan. Guna meningkatkan optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, disarankan untuk Pemerintah Kabupaten Blora meningkatkan pendapatan daerah dengan memaksimalkan potensi daerah sehingga kemampuan keuangan meningkat, mengadakan pelatihan kepada pegawai pengelola keuangan dan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Selain itu, penelitian juga hanya dilakukan pada satu perangkat daerah yaitu Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora dan beberapa pegawai sebagai informan yang dipilih berdasarkan Teori Optimalisasi Siringoringo

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari keterbatasan dalam temuan penelitian. Oleh karena itu penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama yaitu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah yang berkaitan dengan topik optimalisasi belanja modal untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur agar mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu.
- Cresswell, J. W. (2015). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Finuliyah, F., & Khusaini, M. (2022). Pendapatan Asli Daerah, Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Wilayah. *Jdess*, 1(1), 18–28.
- Kadji, Y. (2016). *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Penerbit Deepublish.
- Kuncoro, M. (2010). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Fokus Media.
- Magfiroh, A. M. (2019). Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–18.
- Nurdin, I. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial*. IPDN pers.
- Perdana, A. A., Aru, A., & Eka, H. (2023). *Studi Pendekatan 7S Mckinsey Dalam Peningkatan Efektivitas Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Semarang*. 5(1).
- Rambe, S. S. U., & Iskandar, D. A. (2021). Peran Belanja Modal Pada Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Riset Pembangunan*, 3(2), 88–96. <https://doi.org/10.36087/jrp.v3i2.78>

- Savitri, A. N., & Sari, S. P. (2022). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan: Tinjauan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. *Business and Economics Conference in Utilization of Modern Technology*, 916–927. <https://journal.unimma.ac.id>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Alfabeta.
- Siregar, D. B. (2015). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Berbasis Akrual)* (Cetakan pe). Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Siringoringo, H. (2005). *Seri Teknik Riset Operasional ; Pemrograman Linear*. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Usman, Husaini; Akbar, P. S. (2017). *Metodologi Penelitian Sosial* (R. Damayanti (ed.)). Bumi Aksara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah

